



Human Security dan Pelanggaran HAM: Studi Kasus Migrasi Warga Negara Ethiopia di Perbatasan Arab Saudi-Yaman 2022-2023

Firdha Usmina Safitri

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin

Email: safitri21e@student.unhas.ac.id

Agussalim Burhanuddin

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin

Email: agus.unhas@gmail.com

Alamat: Kampus Univeristas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah,
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: safitri21e@student.unhas.ac.id

Abstract. *Migration has been a significant social phenomenon since ancient times, evidenced by ancient humans migrating from Africa to other continents. Today, Ethiopia faces increased international emigration due to various conflicts, prompting many to seek better opportunities in Saudi Arabia. However, this migration process often entails serious risks to individuals' security and well-being, particularly concerning human rights violations. This paper examines these issues through the lens of human security, emphasizing the protection of migrants' physical safety, freedom from violence and exploitation, access to basic needs, and the preservation of human dignity.*

Keywords: *Ethiopian migration, Human rights violations, Human security, International law, Migrant rights*

Abstrak. Migrasi telah menjadi fenomena sosial yang signifikan sejak zaman kuno, dibuktikan dengan manusia purba yang bermigrasi dari Afrika ke benua lain. Saat ini, Ethiopia menghadapi peningkatan emigrasi internasional karena berbagai konflik, yang mendorong banyak orang untuk mencari peluang yang lebih baik di Arab Saudi. Namun, proses migrasi ini sering kali menimbulkan risiko serius bagi keamanan dan kesejahteraan individu, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji isu-isu tersebut melalui lensa keamanan manusia, yang menekankan perlindungan terhadap keselamatan fisik para migran, kebebasan dari kekerasan dan eksploitasi, akses terhadap kebutuhan dasar, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: Hak migran, Keamanan manusia, Hukum internasional, Migrasi Ethiopia, Pelanggaran hak asasi manusia.

LATAR BELAKANG

Migrasi telah menjadi fenomena sosial sejak zaman kuno, dibuktikan dengan manusia purba yang bermigrasi dari Afrika ke benua lain (Blakemore, 2019). Migrasi, baik secara sukarela maupun paksa, telah lama diwarnai dan dikarakterisasikan oleh perang, perbudakan, dan penganiayaan, dimana saat ini terdapat 117,3 juta orang di seluruh dunia yang menjadi pengungsi atau pencari suaka menurut UNHCR per 2023. Hal yang sama juga terjadi pada warga negara Etiopia, dimana angka emigrasi internasional telah meningkat sebagai dampak berbagai konflik yang mendorong mereka untuk meninggalkan negaranya, mulai dari kekeringan hingga perang saudara, yang mengakibatkan 149,603 orang kini memandang status sebagai imigran atau pencari suaka (UNHCR, 2022).

Fenomena migrasi warga Etiopia ke Arab Saudi ini kembali menyoroti pola migrasi di wilayah tersebut, yakni di Tanduk Afrika dan Jazirah Arab. Banyak dari warga Ethiopia memilih untuk datang ke Saudi karena ketersediaan lapangan kerja dan kedekatan geografis, serta ikatan dan jaringan historis, di mana banyak dari mereka berharap dapat memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar di Arab Saudi dibandingkan dengan di kampung halamannya. Namun, proses migrasi ini seringkali menimbulkan risiko serius bagi keamanan dan kesejahteraan individu, terutama dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai contoh, Human Rights Watch (HRW), sebuah lembaga non-pemerintah internasional yang berspesialisasi dalam pemantauan dan advokasi hak asasi manusia, telah mendokumentasikan berbagai pelanggaran hak yang dialami oleh migran Ethiopia di perbatasan Arab Saudi-Yaman. Laporan HRW tahun 2023 dengan judul “*They Fired on Us Like Rain: Saudi Arabian Mass Killings of Ethiopian Migrants at the Yemen-Saudi Border*” menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan, termasuk perlakuan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan, pemerkosaan, dsb., terhadap para migran (HRW, 2023).

Pelanggaran hak ini bertentangan dengan konsep keamanan manusia atau *human security*, yang berusaha melindungi individu dari ancaman kritis terhadap integritas, hak, dan kesejahteraan mereka. Konsep *human security* berbeda dengan konsep keamanan tradisional yang cenderung berfokus pada negara. Konsep keamanan ini berfokus pada perlindungan individu dari ancaman terhadap keselamatan, martabat, dan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks migrasi warga Etiopia ke Arab Saudi melalui Yaman, pertimbangan keamanan manusia mencakup isu-isu seperti keselamatan fisik migran selama transit, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, akses terhadap kebutuhan dasar, dan penjagaan martabat manusia.

KAJIAN TEORITIS

1. *Human Security* (Keamanan Manusia)

Human Security (keamanan manusia) adalah konsep yang hadir yang menantang pandangan tradisional tentang keamanan yang berpusat pada negara, dengan menempatkan manusia sebagai inti dari wacana keamanan. Konsep ini muncul sebagai tandingan terhadap model Westphalia, yang mengutamakan negara termasuk keamanannya di atas segalanya (Endris, 2019). Fokus keamanan tradisional berpusat pada negara, menegaskan peran utamanya sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas perlindungan dan stabilitas. Namun, muncul pertanyaan: apa implikasinya jika terjadi kekurangan dalam aspek keamanan

manusia, mengingat salah satu komponen dasar negara adalah penduduknya? Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang interaksi antara kelangsungan hidup negara dan tindakan manusia. Secara teoritis, manusia dapat hidup tanpa negara, namun tidak dengan sebaliknya. Pada dasarnya, kelangsungan hidup dan fungsi negara sangat bergantung pada keberadaan dan kesejahteraan penduduknya.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan keamanan manusia sebagai perlindungan dari ancaman yang sedang berlangsung seperti kelaparan, penyakit, kejahatan, dan penindasan, serta melindungi individu dari gangguan mendadak dan disruptif terhadap kehidupan sehari-hari mereka (1994). Di luar keamanan fisik, keamanan manusia juga mencakup aspek stabilitas, kesejahteraan, kebebasan, dan kemampuan individu untuk berkembang secara lebih luas. Pendekatan holistik ini tidak hanya menangani bahaya langsung seperti kekerasan dan perang, tetapi juga masalah kronis seperti perampasan sistemik, ketidaksetaraan, dan pelanggaran hak asasi manusia (Andersen-Rodgers & Crawford, 2022, hlm. 8).

Tujuan utama dari *human security* adalah untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2004, UNDP menguraikan tujuh komponen utama dari *human security*: keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Keamanan ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan manusia, dengan memberikan akses terhadap pendapatan, pekerjaan, dan jaring pengaman keuangan, hal ini dapat mengurangi kemiskinan, mendorong stabilitas, dan mendorong pembangunan sosial. Keamanan terhadap pangan/makanan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas makanan bergizi, yang penting bagi kesehatan dan stabilitas masyarakat. Ketahanan kesehatan mencakup akses terhadap layanan kesehatan dan mekanisme pembagian risiko untuk melindungi dari ancaman kesehatan, menjaga kesehatan fisik dan kualitas hidup. Keamanan pribadi melindungi hak-hak dan kebebasan individu, melindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta menumbuhkan rasa aman dan keadilan. Keamanan masyarakat melindungi identitas kolektif dan mendorong kohesi sosial, yang penting untuk stabilitas dan ketahanan masyarakat. Keamanan lingkungan berfokus pada praktik-praktik berkelanjutan, perlindungan sumber daya alam, dan tanggap bencana, melestarikan keanekaragaman hayati, serta menghormati praktik-praktik tradisional untuk menjaga planet ini. Keamanan politik melindungi hak asasi manusia, mencegah penindasan politik, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, memastikan akuntabilitas dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan.

Daya tarik keamanan manusia terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan tantangan kontemporer yang sulit diatasi secara efektif oleh kerangka keamanan tradisional, terutama di era pasca-Perang Dingin (UNDP, 2005). Dengan berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas melalui norma dan lembaga yang fungsional, keamanan manusia bertujuan untuk memastikan bahwa orang dapat hidup dengan bermartabat dengan kebutuhan dasar mereka terpenuhi baik sekarang maupun di masa depan.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep hak asasi manusia (HAM) berkaitan dengan hak-hak intrinsik yang dimiliki setiap individu karena ia adalah manusia. Hak-hak ini bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan seperti usia, ras, etnis, jenis kelamin, agama, atau tempat tinggal, dan tidak tergantung pada peran atau kewajiban lain yang mungkin mereka miliki dalam negara, keluarga, atau kelompok lain (Donnelly & Whelan, 2020, hlm. 22-23). Karena hak asasi manusia melekat pada keberadaan manusia, hak asasi manusia dimiliki secara setara oleh semua orang dan tidak dapat dicabut. Ini berarti hak-hak tersebut tidak dapat dilepaskan, hilang, atau dihilangkan. Dokumen-dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menggarisbawahi universalitas ini dengan menetapkan standar pencapaian yang sama untuk semua orang dan bangsa.

Meskipun keamanan manusia dan hak asasi manusia merupakan konsep yang berbeda dengan fungsi yang terpisah, keduanya juga saling melengkapi. Laporan Komisi Keamanan Manusia (Commission on Human Security/CHS) tahun 2003 yang berjudul "Keamanan Manusia Sekarang" mengartikulasikan hubungan ini dengan menyoroti bahwa keamanan manusia dan hak asasi manusia saling memperkuat satu sama lain. Keamanan manusia membantu mengidentifikasi hak-hak mana yang beresiko dalam konteks tertentu, sementara hak asasi manusia memberikan kerangka kerja untuk mempromosikan keamanan manusia. Interaksi ini menggarisbawahi signifikansi etis dan politis dari kedua konsep tersebut, di mana gagasan tentang tugas dan kewajiban melengkapi pengakuan akan pentingnya keamanan manusia (Boyle & Simonsen, 2004).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan fokus utama pada penelitian perpustakaan atau *library research*. Penelitian ini menggunakan berbagai penelitian terlebih dahulu, dokumen resmi, dan laporan pengamatan yang terkait dengan topik *human security* dan migrasi, seperti "Human Security and Migration:

Human Rights Violations and Challenges of Ethiopian Migrants in the Middle East" oleh Seada Hassen Endris, dan "Cross-Border Migration and Human Trafficking in Ethiopia: Contributing Factors, Policy Responses and the Way Forward" oleh Messay M. Tefera. Selain itu, data juga akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional (INGO), serta laporan-laporan terkait. Proses pengolahan data akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis, di mana data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk memahami dan menjelaskan konteks migrasi Ethiopia ke Arab Saudi serta dampaknya terhadap keamanan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keamanan manusia dalam konteks migrasi warga negara Ethiopia di perbatasan Arab Saudi-Yaman. Dengan analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang kondisi dan kerentanan yang dihadapi oleh para migran Ethiopia selama perjalanan dan masa tinggal mereka di Arab Saudi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap studi migrasi, keamanan manusia, dan hak asasi manusia internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan tren emigrasi dari Ethiopia mengalami peningkatan yang signifikan setelah revolusi tahun 1974, yang menandai berakhirnya kekuasaan panjang Kaisar Haile Selassie. Sebelum periode ini, emigrasi sangat minim; misalnya, antara tahun 1876 dan 1922, hanya 35 orang Etiopia yang bermigrasi ke negara-negara Barat, sementara dari tahun 1922 hingga 1935, 144 orang dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan di bawah prakarsa kekaisaran yang bertujuan untuk memodernisasi administrasi (Terrazas, 2007). Selanjutnya, dari tahun 1941 hingga 1974, sekitar 20.000 orang Ethiopia meninggalkan negara mereka, terutama untuk pendidikan tinggi dan misi diplomatik, dengan tujuan termasuk negara-negara tetangga di Afrika seperti Djibouti, Sudan, dan Kenya, serta negara-negara Timur Tengah seperti Israel dan Arab Saudi (Zekarias, 2023).

Adapun faktor-faktor yang mendorong migrasi lintas batas dari Ethiopia, sebagaimana diidentifikasi melalui berbagai literatur, meliputi motivasi politik, tantangan ekonomi seperti pengangguran kaum muda dan pendapatan yang rendah, tanggung jawab keluarga, dan persepsi positif tentang standar hidup di negara-negara Barat dan Timur Tengah. Tekanan dari keluarga, teman sebaya, dan masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong migrasi sebagai cara untuk keluar dari kemiskinan dan pengangguran (Tefera, 2018).

Migrasi ke negara-negara Timur Tengah dari Ethiopia telah mengalami pertumbuhan yang substansial selama dua dekade terakhir, utamanya bagi para migran berketerampilan rendah, terutama pekerja rumah tangga perempuan yang bertujuan untuk mengurangi

kemiskinan dan menghidupi keluarga mereka dengan cara mengirimkan pendapatan mereka. Tren ini difasilitasi oleh berbagai jaringan sosial, agen-agen ilegal, dan biaya migrasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain seperti Eropa. Rute migrasi utama bagi warga Etiopia ke Arab Saudi adalah menyeberangi Teluk Aden dengan perahu dan melakukan perjalanan melalui Yaman, yang dikenal sebagai "Rute Timur" atau "Rute Yaman." Perjalanan ini sangat berbahaya, dengan laporan dari Human Rights Watch yang merinci berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelundup, pedagang manusia, dan pihak berwenang Yaman yang memeras dan menganiaya para migran. Perjalanan ini biasanya melibatkan beberapa tahap: dari Ethiopia ke Djibouti, kemudian menyeberangi Teluk Aden menuju Aden, lebih jauh lagi ke Saada, dan akhirnya ke perbatasan, yang menyoroti sulitnya jalur migrasi ini (HRW, 2023, hlm. 11). Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa lebih dari 750.000 orang Ethiopia tinggal di Arab Saudi, dengan sebagian besar tidak memiliki dokumentasi yang memadai, yang menyebabkan deportasi massal secara berkala oleh pihak berwenang Arab Saudi. Misalnya, pada 2013/14 saja, lebih dari 165.000 warga Ethiopia dideportasi dalam waktu empat bulan, menggarisbawahi volatilitas koridor migrasi (Kementerian Luar Negeri Ethiopia, 2021; IOM, 2021).

Kondisi Para Migran Di Perbatasan Arab Saudi-Yaman

Pada Desember 2022, sebuah lembaga swadaya masyarakat nirlaba bernama Amnesty International merilis sebuah laporan mengenai situasi yang dialami para migran Ethiopia di perbatasan Arab Saudi-Yaman, yang berjudul "It's like we are not human": Pemulangan paksa, kondisi penahanan yang menjijikkan bagi migran Ethiopia di Arab Saudi. Laporan tersebut membahas tentang perlakuan yang dihadapi para migran di Arab Saudi, baik saat mereka berada di perbatasan, pusat penahanan, maupun saat mereka berada di dalam wilayah Arab Saudi.

Sejak tahun 2017, pihak berwenang Arab Saudi telah melakukan kampanye untuk menindak para migran yang tidak berdokumen, di mana mereka secara sewenang-wenang menahan ratusan ribu migran Ethiopia yang melintasi perbatasan dari Yaman atau yang tinggal di Arab Saudi. Orang-orang ini ditahan tanpa batas waktu dalam kondisi yang tidak manusiawi dan kejam, mengalami penyiksaan dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya, dan akhirnya dideportasi secara paksa ke Ethiopia. Alasan terjadinya penangkapan sewenang-wenang dan perlakuan kejam terhadap para migran adalah karena para migran tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah, sebuah masalah yang diperparah dengan sistem kafala di Arab Saudi, yang biasanya digambarkan sebagai sistem yang kejam. Sistem yang dikenal dengan nama kafala ini memungkinkan para agen untuk mensponsori para pekerja asing.

Sistem ini memberikan majikan kontrol penuh atas buruh migran dan status hukum mereka, yang mengakibatkan sistem ini tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Sebagai contoh, buruh migran sering kali tidak mendapatkan kondisi kerja yang dijanjikan dalam kontrak mereka, salah satunya adalah waktu kerja yang wajar.

IOM melaporkan bahwa antara Januari dan November 2021, pihak otoritas Arab Saudi mendeportasi sekitar 80.000 pria dan wanita Ethiopia, termasuk 8.090 anak-anak. Deportasi ini dihentikan sementara hingga akhir Maret 2022. Para pekerja kemanusiaan yang diwawancarai oleh Amnesty International mengaitkan penghentian ini terutama dengan sumber daya dan tempat penampungan Ethiopia yang tidak mencukupi untuk mendukung para pengungsi yang kembali. Pada Maret 2022, pemerintah Ethiopia mengungkapkan rencana untuk memulangkan lebih dari 100.000 migran Ethiopia yang ditahan di Arab Saudi pada akhir tahun. Mereka mencatat bahwa dari 750.000 warga Ethiopia yang tinggal di Arab Saudi, sekitar 450.000 tidak memiliki dokumen resmi yang sah. Hingga Juni 2022, setidaknya 71.000 migran Ethiopia telah kembali ke Ethiopia, termasuk 4.026 anak-anak, banyak di antaranya tanpa disertai pendamping (Amnesty International, 2022). Semua migran Ethiopia yang diwawancarai oleh Amnesty International menyatakan bahwa mereka ditahan tanpa mengetahui mengapa atau berapa lama mereka akan berada di sana, tanpa akses terhadap otoritas peradilan dan pengacara. Selama masa penahanan, mereka sering kali dibiarkan dalam kondisi yang tidak manusiawi, seperti hanya diberi satu pasang pakaian dan pakaian dalam, yang seringkali menjadi satu-satunya pakaian yang mereka kenakan selama berada di sana. Para wanita dan anak-anak tidur di lantai berdesakan di kamar-kamar yang tidak sehat, kerap kali tidur dengan beralaskan kantung sampah.

Pada tahun 2023, Human Rights Watch (HRW) merilis laporan berjudul "Mereka Menembaki Kami Seperti Hujan: Pembunuhan Massal Migran Ethiopia di Perbatasan Yaman-Saudi," yang mencakup insiden dari Januari hingga Juni 2023. Para migran Ethiopia menggambarkan perjalanan berbahaya melintasi Teluk Aden dengan perahu yang penuh sesak dan tidak aman. Setelah mencapai Yaman, para penyelundup membagi mereka berdasarkan etnis dan mengangkut mereka ke gubernuran Saada di dekat perbatasan Saudi, yang dikuasai oleh kelompok bersenjata Houthi, Ansar Allah. Orang-orang Tigray ditempatkan di pemukiman Al Raqw, sedangkan orang-orang Oromos ditempatkan di kamp Al Thabit. Kamp-kamp ini menampung puluhan ribu migran yang menunggu giliran untuk menyeberang ke Arab Saudi. Kelompok-kelompok ini umumnya berjumlah hingga 200 orang, tak terkecuali mereka yang tidak mampu membayar biaya penyelundupan, terpaksa menghadapi risiko cedera atau kematian akibat serangan di perbatasan. Para migran melihat penjaga perbatasan Arab Saudi

yang langsung menembaki mereka atau setelah menyanjai tujuan mereka. Beberapa penjaga dilaporkan menyanjai anggota tubuh mana yang akan ditembak sebelum menembak, dan yang lainnya memukuli para migran dengan batu dan batangan logam.

Analisis

Keamanan manusia merupakan paradigma yang menantang pandangan tradisional yang berpusat pada negara dengan menempatkan manusia sebagai pusat wacana keamanan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), keamanan manusia terdiri dari tujuh komponen inti: keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Di sisi lain, hak asasi manusia berkaitan dengan hak-hak intrinsik yang melekat pada semua individu berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak ini bersifat universal, berlaku secara universal tanpa memandang perbedaan seperti usia, ras, etnis, jenis kelamin, agama, atau tempat tinggal. Hak-hak ini tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat ditanggalkan, hilang, atau dihilangkan. Menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang mendasar untuk mencapai tujuh aspek keamanan manusia.

Menganalisis situasi migran Ethiopia di perbatasan Saudi-Yaman dalam konteks ini mengungkapkan pelanggaran berat hak asasi manusia dan meremehkan prinsip-prinsip keamanan manusia. Laporan-laporan yang disebutkan mendokumentasikan pembunuhan di luar hukum dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh penjaga perbatasan Saudi terhadap para migran yang tidak bersenjata, termasuk perempuan dan anak-anak. Selain itu, para penyintas telah melaporkan adanya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama berada dalam tahanan, yang selanjutnya melanggar standar internasional yang melarang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dari segi hukum dan peraturan, tindakan-tindakan ini memang melanggar beberapa hukum internasional, seperti UDHR/DUHAM. DUHAM tidak mengikat secara hukum, tetapi selama bertahun-tahun prinsip-prinsip inti dalam DUHAM telah dianggap mengikat sebagai hukum internasional yang lazim dan/atau prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Berdasarkan laporan dari HRW, patroli penjaga perbatasan Arab Saudi diduga telah melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan di luar hukum dan penggunaan kekerasan yang berlebihan. Penjaga perbatasan Saudi berulang kali menembaki kelompok migran tak bersenjata yang mencoba menyeberangi perbatasan, yang seringkali terdiri dari perempuan dan anak-anak, termasuk ketika mereka sedang beristirahat. Satu kejadian pembunuhan berskala besar, seperti pembantaian individu terhadap kelompok migran yang mencoba melintasi perbatasan yang setidaknya merenggut nyawa puluhan orang, dengan

sendirinya dapat dianggap sebagai serangan yang meluas, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 (1) dan (2) Statuta Roma. Tindakan yang dituduhkan, seperti pembunuhan, merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan sebagai pelanggaran terhadap Pasal Umum III Konvensi Jenewa 1949, "Orang-orang yang tidak mengambil bagian secara langsung atau yang telah berhenti mengambil bagian dalam permusuhan berhak untuk dihormati. Dalam segala situasi, mereka harus diperlakukan secara manusiawi."

Ethiopia hingga saat ini masih dilanda konflik, ketegangan politik dan etnis, perselisihan atas tanah dan sumber daya, serta perselisihan antar-komunal, yang diperparah dengan bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan wabah belalang, seperti yang disoroti oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR) pada bulan Maret 2022. Menanggapi tantangan-tantangan ini, UNHCR mengeluarkan No Returns Advisory, yang mendesak negara-negara untuk mengizinkan warga sipil Ethiopia yang melarikan diri dari kondisi-kondisi tersebut untuk mencari perlindungan dan menekankan prinsip non-refoulement. Terlepas dari situasi ini, para migran Ethiopia menghadapi penolakan dari petugas patroli Arab Saudi. Pengusiran yang dilakukan secara kolektif yang mencegah individu untuk mengakses atau tetap berada di wilayah tertentu, seringkali tanpa penyaringan yang tepat untuk mendapatkan suaka atau perlindungan. Tindakan semacam itu bertentangan dengan hak atas proses hukum yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan prinsip hukum internasional yang berlaku umum, yaitu non-refoulement. Patut dicatat bahwa Arab Saudi, meskipun tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, masih berkewajiban di bawah perjanjian internasional dan hukum kebiasaan untuk menjunjung tinggi non-refoulement. Prinsip ini melarang pengembalian individu ke situasi di mana mereka akan menghadapi penganiayaan, penyiksaan, bahaya serius, atau ancaman terhadap nyawa.

Dalam konteks Yaman, kelompok Houthi telah terlibat dalam mengkoordinasikan langkah-langkah keamanan dan memfasilitasi akses ke perbatasan di Gubernuran Saada. Selain itu, laporan-laporan menunjukkan bahwa para penyelundup dan pasukan Houthi telah menahan para migran dan terlibat dalam praktik-praktik pemerasan, tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan perdagangan manusia. Menurut Protokol Trafficking, yang ditandatangani oleh Ethiopia dan Arab Saudi, perdagangan orang didefinisikan sebagai berbagai bentuk pemaksaan, termasuk pemaksaan atau penipuan, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Sekitar 43.000 migran saat ini terdampar di seluruh Yaman karena ketidakamanan yang sedang berlangsung yang ditandai oleh konflik dan ketidakstabilan akibat perang saudara Yaman (International Organization for Migration, 2023). Meskipun Yaman telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang menjamin kewajiban untuk memperlakukan para migran dengan hormat, negara ini, seperti halnya Arab Saudi, belum meratifikasi Statuta Roma. Meskipun demikian, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedua negara terikat untuk menjunjung tinggi hukum dan konvensi internasional di bawah kerangka kerja PBB. Hal ini termasuk menghormati hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada para migran dan pengungsi di bawah hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, terlepas dari ratifikasi perjanjian tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menghadapi fenomena migrasi yang kompleks, terutama dari Ethiopia ke Arab Saudi melalui Yaman, kajian ini menyoroti pentingnya konsep keamanan manusia dan hak asasi manusia. Migrasi ini tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan geopolitik, tetapi juga disertai dengan risiko yang signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan individu. Penelitian ini menggambarkan bahwa migrasi sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk perlakuan tidak manusiawi terhadap para migran Ethiopia di perbatasan Arab Saudi-Yaman.

Human Rights Watch dan Amnesty International telah mendokumentasikan berbagai pelanggaran, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan dalam kondisi yang tidak layak. Hal ini tidak hanya menunjukkan kegagalan sistem keamanan tradisional yang berfokus pada negara, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berorientasi pada keamanan manusia. Keamanan manusia menekankan perlindungan individu dari ancaman kritis terhadap integritas, hak, dan kesejahteraan mereka, sementara hak asasi manusia menjamin bahwa semua individu, tanpa memandang status atau keadaan mereka, memiliki hak intrinsik yang harus dihormati.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi oleh migran Ethiopia di Arab Saudi tidak hanya menunjukkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan kekerasan, tetapi juga menggambarkan ketidakmampuan sistem internasional untuk melindungi mereka dengan cukup efektif. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran internasional, memperkuat perlindungan hukum, dan memastikan akses yang adil terhadap proses hukum menjadi krusial dalam memitigasi risiko yang dihadapi migran di koridor migrasi ini.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi antara lain menghentikan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap imigran berdasarkan status imigrasi, dengan memprioritaskan pembebasan perempuan hamil dan anak-anak. Selain itu, mengakhiri pengembalian paksa imigran Ethiopia dan melakukan penilaian individual untuk menentukan kebutuhan perlindungan, terutama bagi orang Tigray yang menghadapi persekusi. Arab Saudi juga perlu menyelidiki dan menghentikan penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi lainnya di pusat-pusat penahanan, serta memastikan penyelidikan independen terhadap kematian dan penyalahgunaan yang terjadi. Adapun pihak Houthi perlu mengakhiri praktik penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perdagangan manusia, serta menyediakan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan kepada mereka yang pulang dari percobaan lintas batas dengan luka parah. Keduanya diharapkan dapat meratifikasi konvensi dan hukum-hukum internasional yang mendukung transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti Statuta Roma. Pihak PBB dapat membantu dengan mendirikan investigasi independen yang didukung PBB terhadap pembunuhan dan penyalahgunaan terhadap imigran dan pencari suaka di perbatasan Yaman-Arab Saudi, sementara pihak-pihak yang terkait perlu mendesak Arab Saudi untuk mengakhiri kebijakan menargetkan imigran dengan senjata peledak dan serangan dari jarak dekat di perbatasan dengan Yaman.

Secara keseluruhan, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan implementasi konsep keamanan manusia yang holistik sangat penting dalam menanggapi tantangan yang kompleks dari migrasi lintas batas di dunia saat ini. Hanya dengan pendekatan yang berpusat pada manusia dan berlandaskan pada prinsip-prinsip universalitas hak asasi manusia, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu yang terlibat dalam migrasi internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Amnesty International UK. (2022, December 16). Saudi Arabia: Thousands of Ethiopian migrants held in “inhuman” conditions - new report. Retrieved from <https://www.amnesty.org.uk/press-releases/saudi-arabia-thousands-ethiopian-migrants-held-inhuman-conditions-new-report>
- Amnesty International. (2022, December 16). Saudi Arabia: “It’s like we are not human”: Forced returns, abhorrent detention conditions of Ethiopian migrants in Saudi Arabia. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/documents/mde23/5826/2022/en/>
- Andersen-Rodgers, D., & Crawford, K. F. (2022). Human security: Theory and action. Rowman & Littlefield.

- Blakemore, E. (2019, February 28). Human migration sparked by wars, disasters, and now climate. National Geographic. Retrieved from <https://www.nationalgeographic.com>
- Boyle, K., & Simonsen, S. (2004, July). Disarmament forum: Human rights, human security and disarmament. Retrieved from <https://unidir.org/publication/disarmament-forum-human-rights-human-security-and-disarmament/>
- Donnan, H., & Wilson, T. M. (2021). *Borders: Frontiers of identity, nation and state*. Routledge.
- Donnelly, J., & Whelan, D. J. (2020). *International human rights*. Routledge eBooks. <https://doi.org/10.4324/9780429266072>
- Endris, S. H. (2019, June 12). Human security and migration: Human right violations and challenges of Ethiopian migrants in the Middle East. Retrieved from <https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/113>
- Human Rights Watch [HRW]. (2023, August). They fired on us like rain: Saudi Arabian mass killings of Ethiopian migrants at the Yemen-Saudi border. United States of America: Human Rights Watch. Retrieved from https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2023/08/saudiarabia_rmr0823_web_0.pdf
- International Organization for Migration. (2023, July 5). Soaring number of migrants in distress in Yemen demands greater relief efforts. Retrieved from <https://www.iom.int/news/soaring-number-migrants-distress-yemen-demands-greater-relief-efforts>
- IOM - UN Migration. (2022, April 30). Returning home isn't easy for migrants in Ethiopia - IOM - UN Migration. Medium. Retrieved from <https://medium.com>
- Kumar, S., & Dahiya, T. (2024, March). Enhancing human security through local climate actions. UNDP. Retrieved from https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-03/enhancing_human_security_through_local_climate_actions_report_-_final.pdf
- Owen, T. (2004). Challenges and opportunities for defining and measuring human security. Human Rights, Human Security and Disarmament. Retrieved from <https://unidir.org/files/publication/pdfs/human-rights-human-security-and-disarmament-en-344.pdf>
- Raharjo, S. N. I., & Intarti, Y. R. (2021, January). Human security in border area: Security or welfare? Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI. Retrieved from <https://ir.fisip.ui.ac.id/human-security-in-border-area-security-or-welfare/>
- Sedra, M. (2022, June). The people-centered approach to security. Retrieved from <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/The%20People-Centered%20Approach%20to%20Security.pdf>

- Sudiar, S. (2018). Pendekatan human security dalam studi perbatasan negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72139>
- Tefera, M. M. (2018). Cross-border migration and human trafficking in Ethiopia: Contributing factors, policy responses and the way forward. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 12(1), 93–116. <https://doi.org/10.1007/s40647-018-0218-y>
- Terrazas, A. M. (2007, June). Beyond regional circularity: The emergence of an Ethiopian diaspora. Retrieved from <https://www.migrationpolicy.org/article/beyond-regional-circularity-emergence-ethiopian-diaspora>
- The states parties to the Rome Statute | International Criminal Court. (n.d.). Retrieved from <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>
- UNHCR - The UN Refugee Agency. (2024, June 13). Figures at a glance. Retrieved from <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/figures-glance>
- UNHCR - The UN Refugee Agency. (n.d.). Refugee statistics. Retrieved from <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=seHVF5>
- United Nations Development Programme [UNDP]. (2005). The human security framework and national human development reports. Retrieved from <https://hdr.undp.org/system/files/documents/human-security.human-security>
- United Nations General Assembly. (1948). The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). New York: United Nations General Assembly.
- Zekarias, A. Y. (2023). The nature and patterns of international migration of Ethiopia. IntechOpen eBooks. <https://doi.org/10.5772/intechopen.108056>